

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, mewujudkan pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan nasional dan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional Indonesia merupakan suatu model pembangunan yang memuat pengalaman hidup membujur, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, dengan tujuan dan pedoman jangka waktu.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan pembangunan terus berlangsung, pembangunan merupakan salah satu proses perubahan sosial menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahwa negara bagian dapat menyelenggarakan secara bersamaan atas dasar pemerintahan negara bagian dan peraturan gubernur. Kalau walikota, pemerintah kabupaten/kota yang urus.

Pembangunan daerah di arahkan untuk memicu pemerataan pembangunan dan hasil-hasil dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara maksimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang perlu ditingkatkan sebagai perwujudan wawasan nusantara.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 telah memberikan hasil yang sangat menantang bagi negara. Di sisi lain, kebebasan membangun daerah tentu terbuka bagi daerah, namun di sisi lain banyak persoalan yang harus diselesaikan. Persoalannya adalah transisi dari pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi, seperti sumber daya ke pembiayaan pembangunan, tenaga kerja untuk kegiatan pembangunan, dan banyak lagi. UU No. 6 Tahun 2014 mengacu pada dua pendekatan untuk desa: “Bangun desa” dan “bangun desa” Dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dan kualitas hidup serta pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan infrastruktur untuk meningkatkan kekuatan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan dewan desa. Pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan desa dan dewan desa adalah bagian dari pemerintahan desa. Politik: BPDI bekerja sama dengan kepala desa untuk mengeluarkan peraturan desa, mempertimbangkan dan mengatur keinginan masyarakat yang menjadi sandaran.

Atas dasar undang-undang tersebut jelas dipercayakan kepada kepala desa untuk melaksanakan pembangunan desa, tentunya dengan segala kewenangan yang menjadi hak salah satunya melalui partisipasi warga. Untuk menggerakkan warga dalam partisipasinya dalam pembangunan, maka diperlukan adanya penggerak/faktor yang dapat menggerakkan dan menyatukan keterampilan masyarakat agar dapat mencapai tujuan pembangunan dalam hubungan tersebut, dengan kepala desa sebagai kepala desa tertinggi memainkan peran yang ditugaskan.

Mengingat kompleks pembangunan di tingkat pemerintah desa, Oleh karena itu, salah satu aspek pertama adalah menjalin berbicara dengan baik adalah perangkat desa atau serta meningkatkan kapasitas perangkat dalam desa agar melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, serta memperbanyak partisipasi dalam bermasyarakat dan kelembagaan seperti pimpinan tertinggi dan penanggung jawab. untuk implementasi dan pengembangan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan masalah ini penulis menduga di Desa Panca Makmurtelah membuat pembangunannya sendiri sehingga mengalami minim dan kurangnya

dalam pergerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunannya dalam hal ini pembangunan fisik ini perlu di tangani oleh Kepala Desa, beserta masyarakat yang berada di desa. Pembangunan fisik struktural dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur desa yang tidak dikelola dengan baik oleh kepala desa, serta sarana dan prasarana yang masih minim, seperti: Pertama, jalan rusak dan belum banyak jalan yang beraspal. Kedua, sumber air bersih membuatnya tidak dapat diakses oleh semua penduduk desa. Ketiga, kondisi jembatan sangat memprihatinkan karena terlalu banyak lubang di sekitar jembatan. Peran kepala desa sebagai kepala pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan fisik desa sangat diharapkan. Oleh Karena itulah suksesnya pembangunan di suatu daerah sangat di tentukan oleh kualitas kinerja pemerintahannya.

Bertitik tolak dalam pelaksanaan pembangunan fisik di tingkat desa, terutama di Desa Panca Makmur Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara adapun peneliti ini meneliti tentang **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Panca Makmur Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berkenaan dengan hasil yang dijelaskan di atas, peneliti berusaha untuk menguraikan masalah yang ingin mereka uji tanpa mempersulit pengumpulan data

yang diperlukan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam meningkatkan pengembangan Fisk di Desa Panca Makmur Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Soyo Jaya?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan fisik di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Dalam melakukan peran kepala desa untuk meningkatkan pembangunan fisik di Desa Panca Makmur Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara
- b. Dalam mengetahui faktor-faktor yang dipengaruhi oleh peran Kepala Desa untuk meningkatkan pembangunan fisik di Desa Panca Makmur Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara

2. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

a. Secara akademis

Penelitian dapat diharapkan agar dilakukan referensi penelitian lain dalam melaukan maslah yang lain dan bersangkutan dengan Kepala Desa untuk lebihnya adanya peningkatan dalam pembangunan fisik desa.

b. Secara praktis

Di harapkan untuk di jadikan sumbangan pemikiran oleh pihak yang berkepentingan sebagai aparat pemerintah dan masyarakat

